

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dialektika dunia bisnis sepanjang sejarah selalu terlibat dalam interaksi sosial yang tak kunjung henti. Yaitu, interaksi yang sangat kompleks yang melibatkan tidak hanya teori- teori ekonomi dan bisnis rasional saja mulai dari yang bersifat sosial sampai yang bercorak liberal-kapitalis, tetapi juga individu- individu manusia yang heterogen dan dinamis yang terlibat baik secara langsung atau tidak dalam kegiatan bisnis.¹

Dalam perkembangan kontemporer ini, dunia islam sedang melewati salah satu fase sejarah dunia, yaitu masa krisis global. Di tengah krisis global dengan sistem kontemporer yang bebas nilai dan hampa nilai, dominasi perusahaan paham kapitalis dan sosialis, kita menemukan islam sebagai suatu sistem yang mampu memberikan daya tawar positif dengan menghadirkan nilai- nilai etika dan moral yang lengkap serta mengajarkan semua dimensi kehidupan.²

Keunikan pendekatan islam terletak pada sistem nilai yang salah satunya mewarnai tingkah laku ekonomi masyarakat.

¹ Iwan Triuwono, *Akuntansi Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.64.

² M. Dawam Rahardjo, *Ekonomi Islam: Apakah itu ?*, Makalah, Jakarta, 2001, hlm.3.

Dalam islam diajarkan nilai- nilai dasar ekonomi yang bersumber pada ajaran tauhid. islam lebih dari sekedar nilai- nilai dasar etika ekonomi, seperti keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab dan keadilan, tetapi juga memuat keseluruhan nilai- nilai yang fundamental serta norma- norma yang substansial agar dapat diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam di masyarakat.

Di Indonesia LKM diatur dalam Undang- Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Menurut Pasal 1 (1) Undang- Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan LKM adalah:³ Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata- mata mencari keuntungan.

LKM atau Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal dan informal. Dengan kata lain, LKM merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal

³ UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 1 (1).

dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. LKM memiliki produk yang relatif lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun Jenis LKM itu sendiri ada berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah *Baitul Mal Wa Tamwil* (selanjutnya disebut BMT). BMT yang dalam peraturan sekarang ini telah berubah nama menjadi Koeprasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah. Baitul Mal berfungsi sebagai pengumpulan dan penyaluran dana untuk kepentingan sosial, sedangkan Bitu Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (laba). Jadi BMT adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial dan juga bisnis yang mencari keuntungan.⁴

BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).⁵ Pada awalnya *Baitul Mal Wa Tamwil* adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk kelompok simpan pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyaarkat (KSM) yaitu suatu lembaga yang melakukan penghimpunan dana dari anggota masyarakat

⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Keadilan Agama*, Kencana Prenanda Media Groug, Jakarta, 2012, hlm.353

⁵ A. Djazuli, dkk, *Lembaga- Lembaga Perekonomian Umat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.183.

dan diperuntukan bagi anggota. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mencontoh proyek yang sering dilakukan pemerintah dalam upaya pengembangan masyarakat.

Selain merupakan lembaga pengelola dana masyarakat yang memberikan pelayanan tabungan, pinjaman kredit, dan pembiayaan, BMT juga dapat berfungsi mengelola dana sosial umat diantaranya menerima titipan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Semua produk pelayanan dan jasa BMT dilakukan menurut ketentuan Syariah, yakni prinsip bagi hasil (*profit and loss-sharing*).⁶

Dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) memiliki karakteristik tersendiri dalam pengelolaan keuangan, karakter yang paling terlihat dalam lembaga keuangan syariah yaitu penerapan akad-akad baik dalam produk pembiayaan ataupun produk tabungan. Selain perbedaan karakteristik penerapan akad-akad baik dalam produk pembiayaan ataupun produk tabungan semua lembaga keuangan syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS), tidak terkecuali baik itu bank syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS).

Sebagai sebuah etnis ekonomi syariah, keseluruhan dari usaha dan kegiatan BMT tunduk pada prinsip syariah. Secara umum kegiatan usaha

⁶ Yadi Janwari, *Lembaga- Lembaga Perekonomian Syariah*, Pustaka Mulia, Bandung, 2000, hlm.107.

dan bisnis BMT diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS ini selanjutnya menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap konsistensi dan implementasi syariah pada BMT.

DPS dalam Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) menjadi satu persyaratan yang mutlak ada, keberadaanya akan menjamin penerapan konsepsi syariah dari BMT, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/ PER/ M.KUKM/ XII/ 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi pada BAB.2 Bagian ke-1 Pasal 2 Point 3 dijelaskan bahwa koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Selain itu Dewan Pengawas Syariah pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)/ Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) tidak hanya diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/ PER/ M.KUKM/ XII/ 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Akan tetapi diatur pula oleh regulasi lain yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/ POJK.05/ 2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, yang mana satu lembaga diatur oleh dua ketentuan yang ternyata isinya berbeda.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai DPS pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)/ Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang diatur oleh dua aturan yang masih berlaku maka dari itu penulis tergerak untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya tulis dengan judul **“Dualisme Peraturan Yang Mengatur Eksistensi BMT Antara POJK Nomor 30 /POJK.05/2014 dan PERMEN.KOP Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)/ Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) tidak hanya diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/ PER/ M.KUKM/ XII/ 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi akan tetapi diatur pula oleh regulasi lain yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/ POJK.05/ 2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perusahaan Pembiayaan, yang mana satu lembaga diatur oleh dua ketentuan yang ternyata isinya berbeda.

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan peneliti, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan di teliti dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perbandingan Substansi Hukum Antara POJK No. 30/ POJK. 05/ 2014 Dengan PERMEN.KOP No.11 /PER /M.KUKM /XII /2017 Tentang Dewan Pengawas Syariah ?
2. Bagaimana Analisis Kritis Terhadap Keberadaan POJK No. 30/ POJK. 05/ 2014 Dengan PERMEN.KOP No.11 /PER /M.KUKM /XII /2017 Tentang Dewan Pengawas Syariah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan suatu masalah tidak terlepas dari tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Dan Meneliti Perbandingan Substansi Hukum Antara POJK No. 30/ POJK. 05/ 2014 Dengan PERMEN.KOP No.11 /PER /M.KUKM /XII /2017 Tentang Dewan Pengawas Syariah.
2. Untuk Mengetahui Dan Meneliti Analisis Kritis Terhadap Keberadaan POJK No. 30/ POJK. 05/ 2014 Dengan

PERMEN.KOP No.11 /PER /M.KUKM /XII /2017 Tentang
Dewan Pengawas Syariah.

2) Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan tema yang sama akan tetapi dengan metode yang berbeda dan teknis analisa yang berbeda, sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kelanjutan ilmu pengetahuan.
- b. dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi penelitian tentang Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan dewan pengawas syariah serta sebagai media untuk mengembangkan khazanah teori yang berhubungan dengan hukum muamalah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang terkait yang bergerak di bidang lembaga keuangan mikro syariah.

- b. Dapat dijadikan sumbang fikiran terkait pelaksanaan Dewan Pengawas Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS).

D. Studi Terdahulu

Untuk mendukung data skripsi ini, penulis akan mengacu pada karya ilmiah yang sudah ada, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama, diantaranya :

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Suci Asri Astuti dengan judul “Upaya Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Mitra (Penyimpan) Terkait Penjaminan Dan Simpanan (Studi Kasus : BMT Al- Fatah IKMI Pamulang)” yang diterbitkan pada tahun 2018. Kesamaan penelitian penulis dengan karya ilmiah Suci Asri Astuti adalah sama- sama meneliti mengenai BMT akan tetapi fokus penelitiannya berbeda, penulis lebih kepada Dewan Pengawas Syariahnya, akan tetapi skripsi yang ditulis oleh Suci Asri Astuti yaitu lebih kepada perlindungan hukum terhadap mitranya terkait simpan pinjamnya.⁷

⁷ Suci Asri Astututi, *Upaya Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Mitra (Penyimpan) Terkait Penjaminan dan Simpanan*. 2018

- 2) Untuk selanjutnya untuk mendukung skripsi ini penulis mengacu pada skripsi yang sudah ada, yang ditulis oleh Ulfa Fauziah dengan judul “Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk BMT As-Syafi'iyah Gisting Tanggamus Menurut Etika Kerja Islam” yang diterbitkan pada tahun 2017. Persamaan penelitian penulis dengan Ulfa Fauziah adalah sama-sama menyinggung mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan tetapi fokus penelitiannya berbeda. Penulis lebih memfokuskan pada relevansi DPS Pada PERMEN KOP dan OJK, akan tetapi skripsi yang ditulis oleh Ulfa Fauziah lebih kepada Peran DPS dalam etika kerjanya.⁸
- 3) Dalam mendukung skripsi ini penulis tidak hanya mengacu pada skripsi- skripsi akan tetapi mengacu pula pada jurnal. Adapun jurnal yang tulis oleh Sopiya yang berjudul “Analisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI NO.3 Tahun 2000 Berkaitan Dengan Dewan Pengawas Syariah di Bitul Mal Wa Tamwil (BMT) Studi Kasus di BMT Bima Magelang” yang diterbitkan pada tahun 2012. Persamaan penelitian penulis dengan Sofiya yaitu sama- sama membahas mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS), akan tetapi fokus penelitiannya berbeda. Sofiya lebih menfokuskan kepada

⁸ Ulfa Fauziah, *Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk BMT As- Syafi'iyah Gisting Tanggamus Menurut Etika Kerja Islam*. 2017

Efektifitas Keputusan DSN-MUI NO.3 Tahun 2000 nya sedangkan penulis lebih memfokuskan DPS Dalam PERMEN KOP NO. 11/ PER/ M.KUKM/ XII/ 2017 dan POJK NO.30/ POJK.05/ 2014.⁹

Tabel 1.1
Studi Pendahuluan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Suci Asri Astuti	“Upaya Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Mitra (Penyimpan) Terkait Penjaminan Dan Simpanan (Studi Kasus : BMT Al-	Persamaannya yaitu sama- sama meneliti mengenai Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).	skripsi yang ditulis oleh Suci Asri Astuti yaitu lebih kepada perlindungan hukum terhadap mitranya terkait simpan pinjam. Sedangkan Fokus Penulis dalam penelitian ini lebih kepada

⁹ Sofiyah, *Analisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI NO.3 Tahun 2000 Berkaitan Dengan Dewan Pengawas Syariah di Bitul Mal Wa Tamwil (BMT) Studi Kasus di BMT Bima Magelang*, Vol.3, No.1, 2012.

		Fatah IKMI Pamulang)”		Dewan Pengawas Syariahnya.
2	Ulfa Fauziah	“Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk BMT As- Syafiiyah Gisting Tanggamus Menurut Etika Kerja Islam”	Persamaan penelitian penulis dengan Ulfa Fauziah adalah sama- sama menyinggung mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS)	akan tetapi fokus penelitiannya berbeda. Penulis lebih memfokuskan pada relevansi DPS Pada PERMEN.KOP dan OJK, akan tetapi skripsi yang ditulis oleh Ulfa Fauziah lebih kepada Peran DPS dalam etika kerjanya.

3	Sopiyah	<p>“Analisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI NO.3 Tahun 2000 Berkaitan Dengan Dewan Pengawas Syariah di Bitul Mal Wa Tamwil (BMT) Studi Kasus di BMT Bima Magelang”</p>	<p>Persamaan penelitian penulis dengan sofiyah yaitu sama- sama membahas mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS).</p>	<p>Fokus penelitiannya berbeda. Sofiyah lebih menfokuskan kepada Efektifitas Keputusan DSN-MUI NO.3 Tahun 2000 sedangkan penulis lebih memfokuskan DPS Dalam PERMEN KOP NO. 11/ PER/ M.KUKM/ XII/ 2017 dan POJK NO.30/ POJK.05/ 2014.</p>
---	---------	---	---	---

E. Kerangka Pemikiran

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).¹⁰

Secara konseptual BMT memiliki 2 fungsi yaitu: ¹¹

1. Bait At- Tamwil (Bait artinya rumah, At-Tamwil artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan- kegiatan pengembangan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

¹⁰ A Djazuli, dkk, *Lembaga- lembaga Perekonomian Umat...* hlm.183.

¹¹ M Amin Aziz, *Pedoman Pendirian BMT (Baitul Mal Wa Tamwil)*, Pinbuk Press, Jakarta, 2004, hlm.1.

2. Bit Al- Mal (Bait artinya rumah dan Al- Mal artinya harta) menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Sebagai lembaga usaha yang mandiri BMT memiliki ciri- ciri sebagai berikut:¹²

1. Berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak- banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.
2. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf.
3. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat sekitarnya.
4. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar BMT.

Tidak hanya itu kegiatan BMT terdapat dalam ayat Al-Qur'an dan Hadist diantaranya adalah:

¹² Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.24.

1. Al- Maidah Ayat.2¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Berdasarkan pada ayat Al-Quran di atas kiranya dapat dipahami

bahwa tolong- menolong dalam kebajikan dan dalam ketaqwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan suatu bebtuk tolong-menolong, kerja sama dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi

¹³ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, CV.Penerbit Di Ponogoro,2010.

kebutuhan dan tolong- menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketaqwaan yang sempurna (haqa tuqatih).¹⁴

2. H.R Muslim No.2971, dalam kitab Al-Masaqqah.¹⁵

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ
وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنَّبْرُ بِالنَّبْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya:

Diriwayatkan oleh Abu Said Al- Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (Cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama- sama bersalah.

Keadilan adalah moderasi dan keseimbangan. Dalam Al- Qur'an al- adl dengan al- mijan berhubungan erat dengan makna ash-shirat al- mustaqim, jalan lurus sebagaimana yang dimaksud dalam surat Al- Fatihah ayat terakhir. Maksudnya ialah jalan yang dilalui mereka yang mendapat nikmat tuhan, yakni para Nabi dan Rasul Allah.¹⁶

Adapun Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam kamus Bahasa Indonesia kata”Dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.295

¹⁵ H.R Muslim No.2971, dalam kitab Al-Masaqqah

¹⁶ Juhaya S. Pradja. *Ekonomi Syariah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 29

pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas.¹⁷ Sedangkan syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah maupun bidang muamalah yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muamalah maliyah*.¹⁸

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan di berhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.¹⁹

Baitul Mal Wa Tamwil itu sendiri di ikuti oleh beberapa peraturan yang menaunginya, sesuai dengan bentuk badan hukum BMT itu sendiri.

Diantaranya:

1. Keputusan Mentri Koprasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/ M.KUKM/ XII/ 2017 Tentang

¹⁷ Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm.289.

¹⁸ Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm.24.

¹⁹ Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2007, hlm.16.

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koprasi. Dalam PERMEN ini pada BAB 2 Pasal 2 Point 3 dijelaskan bahwa koprasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).²⁰

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/ POJK.05/ 2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Pada Bab.1 Pasal.1 point.14 disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah yang Selanjutnya disingkat (DPS) adalah bagian dari organ perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraann kegiatan perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.²¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Langkah- Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

²⁰ PERMEN KOP Nomor: 11/PER/ M.KUKM/ XII/ 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koprasi.

²¹ POJK Nomor: 30/ POJK.05/ 2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk mengadakan penelusuran terhadap peraturan- peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²²

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan penulis dalam mengambil kesimpulan maka penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan Dewan Pengas Syariah yang ada pada POJK No. 30/ POJK. 05/ 2014 Dengan PERMEN.KOP No.11 /PER /M.KUKM /XII /2017 kemudian mengkomparasikan atau membandingkan kedua regulasi tersebut.

2. Sumber Data

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature kepustakaan atau buku- buku yang berkaitan dengan phenomena yang penulis teliti yaitu yang berkaitan dengan data yang diteliti. Adapun Menurut Roni Hanitijo Soemitro Penelitian dengan menggunakan data sekunder yaitu bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data- data sekunder, serta bahan- bahan hukum yang

²² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.13-14.

mengikat.²³ Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam menunjang penelitian ini adalah POJK No. 30/ POJK. 05/ 2014 Dengan PERMEN.KOP No.11 /PER /M.KUKM /XII /2017.

3. Jenis Data

Jenis data yang di teliti adalah data kualitatif, kualitatif merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklsifikasikan sesuai dengan butir- butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan sebagai pelengkap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, dan tehnik pengumpulan data yang digunakan, yaitu²⁴:

- a. Studi kepustakaan

²³ Roni Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimerti* ... hlm.10.

²⁴Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm.224

Studi Kepustakaan (*library research*) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh dan mengumpulkan data yang sejenis yang berhubungan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di POJK No. 30/ POJK. 05/ 2014 Dan PERMEN.KOP No.11 /PER /M.KUKM /XII /2017.

5. Analisis Data

Dalam proses analisis data penulis menggunakan langkah- langkah sebagai berikut:

- a. Inventarisasi data. Yaitu mengumpulkan data- data yang terkait dengan topik penelitian.
- b. Mempelajari dan menelaah seluruh data yang terkumpul.
- c. Mengklasifikasikan data, yaitu memilih dan memilah data- data yang terkumpul sehingga data tersebut bisa menunjang terhadap topik penelitian..
- d. Membandingkan data- data yang diperoleh, kemudian menghubungkan dengan ketentuan dan aturan yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

- e. Menarik Kesimpulan.



